

**Hariyadi B. Sukamdani**  
Ketua Umum DPN APINDO



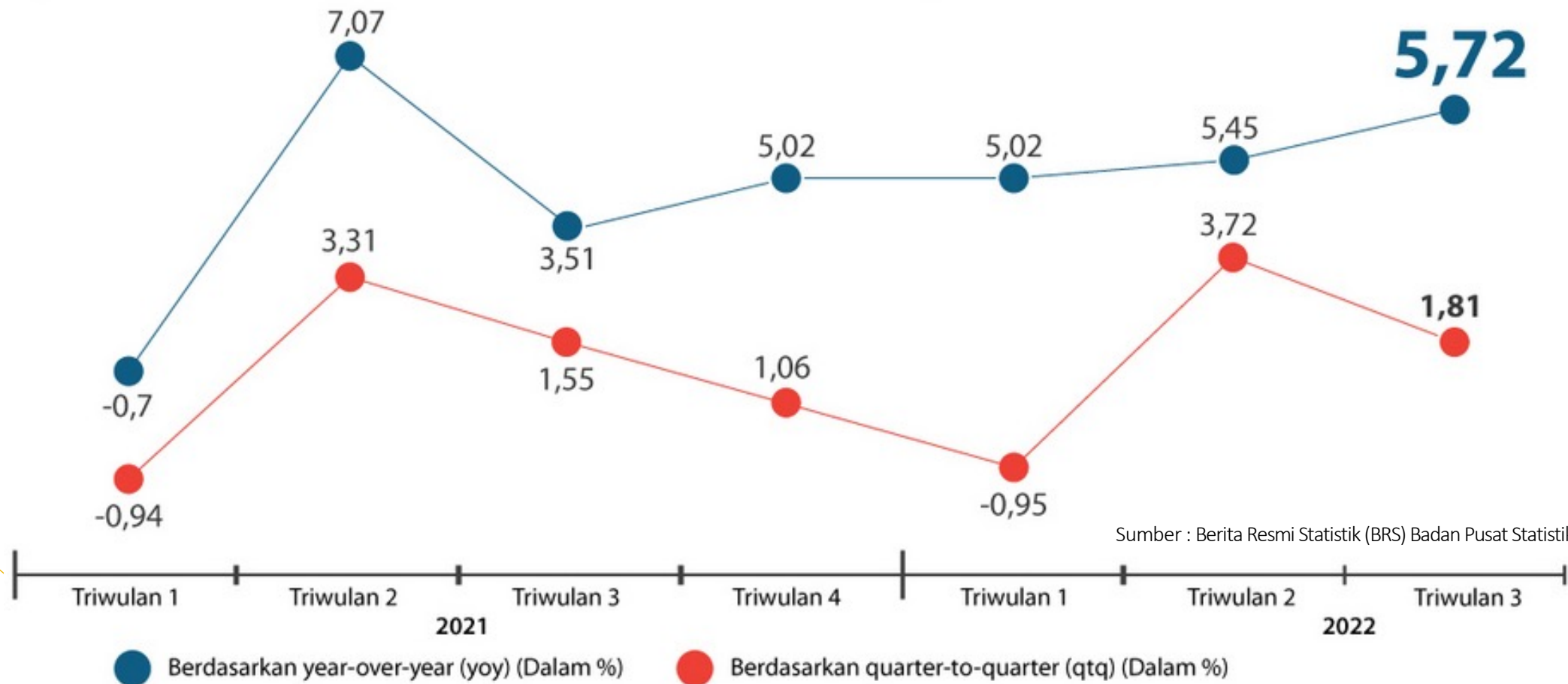
# **MENGELOLA KETIDAKPASTIAN EKONOMI DI TAHUN POLITIK**

**Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia (PEI)**  
*1 Desember 2022*



# **DATA REVIEW & PROYEKSI PEREKONOMIAN 2023**

# EKONOMI INDONESIA Q3 2022 KEMBALI NAIK



Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia **Triwulan I – Triwulan III 2022 dibandingkan dengan Triwulan I – Triwulan III 2021 tumbuh 5,40% (c-to-c)**

# ..... LALU BAGAIMANA DENGAN PROYEKSI Q4 2022 DAN TAHUN 2023 ?

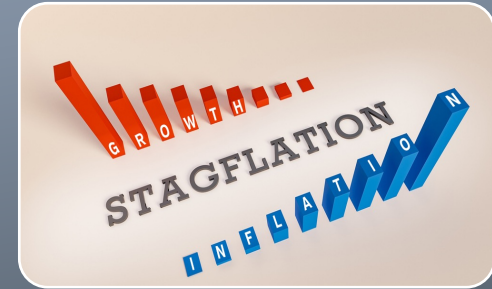
## **PROYEKSI EKONOMI 2022 & 2023 BERBAGAI NEGARA & KAWASAN**

Countries / Area	2019	2020	2021	IMF		World Bank	Bloomberg		OECD	
				2022F	2023F	2022F	2022F	2023F	2022F	2023F
World	2.9	-3.1	6.1	3.2	2.7	2.9	2.9	2.5	3.0	2.2
US	2.3	-3.4	5.7	1.6	1.0	2.5	1.6	0.9	1.5	0.5
Euro Zone	1.6	-6.1	5.2	3.1	0.5	2.5	2.9	0.3	3.1	1.6
Indonesia	5.0	-2.0	3.7	5.3	5.0	5.1	5.2	5.0	5.0	4.8
Japan	-0.4	-4.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	1.5	1.6	1.4
China	6.0	2.2	8.1	3.2	4.4	4.3	3.5	5.2	3.2	4.7
India	3.7	-6.5	8.9	6.8	6.1	7.1	8.7	7.2	6.9	5.7
Russia	2.2	-2.7	4.7	-3.4	-2.3	-8.9	-6.0	-3.0	-4.5	-4.5
Brazil	1.2	-3.9	4.8	2.8	1.0	1.5	2.0	0.9	2.5	0.8
ASEAN-5	4.8	-3.4	3.4	5.3	5.0	-	-	-	-	-

Sumber : IMF (Okt 2022), World Economic Outlook, World Bank (Juni 2022), OECD Interim Economic Outlook, Bloomberg.



# POTENSI PERTUMBUHAN Q4 2022 & TAHUN 2023 INDONESIA TERGANGGU OLEH ANCAMAN DARI PEREKONOMIAN GLOBAL



## Inflasi global melonjak

- Akibat *supply disruption* karena pandemi dan perang, dikombinasi dengan *excessive stimulus* fiskal dan moneter sebelum dan selama pandemi di negara maju

## Pengetatan likuiditas & kenaikan suku bunga

- Menyebabkan volatilitas pasar keuangan global, *capital outflow*, pelemahan nilai tukar dan lonjakan biaya utang (*cost of fund*)

## Potensi krisis utang global

- Banyak negara memiliki risiko utang sangat tinggi di atas 60% - 100% PDB.
- Biaya utang dan *resolving (refinancing) risk* naik tajam
- Potensi *default* >60% negara melonjak

## Potensi Stagflasi global

- Pelemahan ekonomi global disertai inflasi tinggi merupakan kombinasi yang sangat berbahaya dan rumit secara kebijakan ekonomi

# ANCAMAN GLOBAL LAINNYA YANG SIGNIFIKAN : *SITUASI EKONOMI CHINA*

## Perlambatan Ekonomi China & Lockdown Berkepanjangan

Pertumbuhan PDB Q2 2022 China melambat menjadi +0,4% y/y, laju pertumbuhan terendah sejak kontraksi ekonomi China pada Q1 2020 di masa pandemi COVID-19 gelombang pertama.

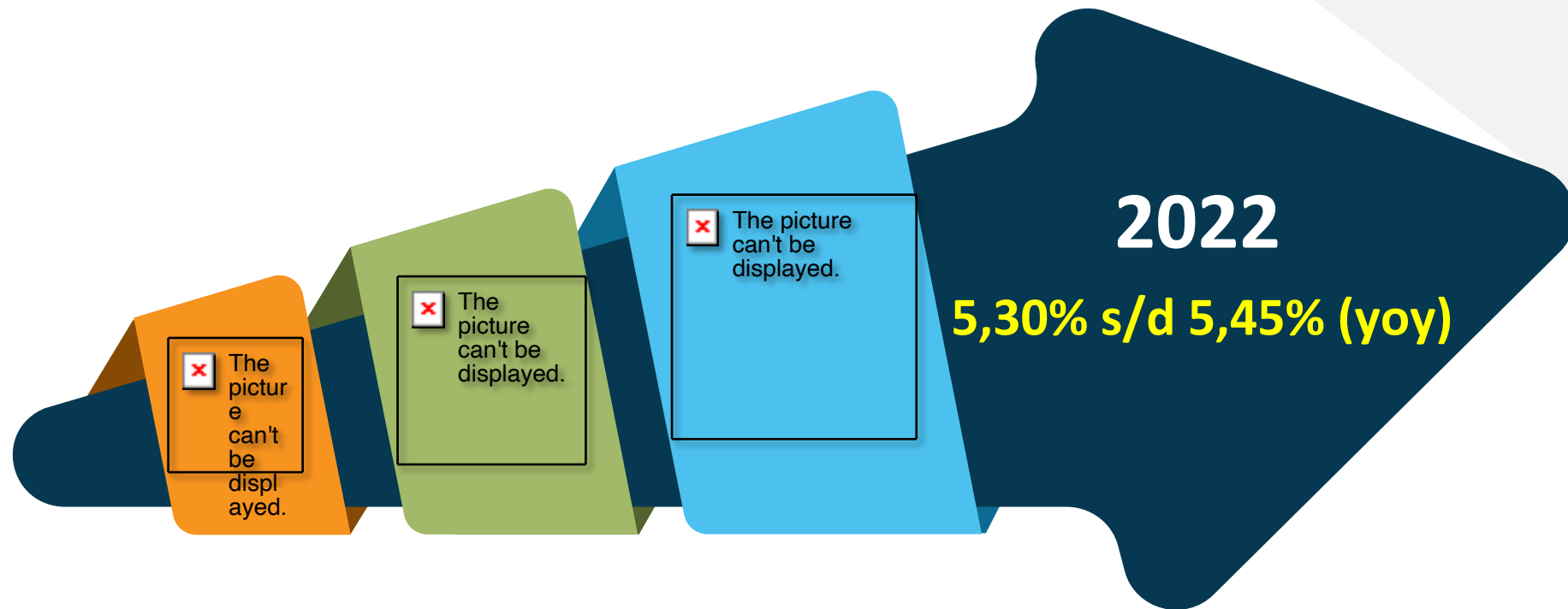
Sebagaimana kita ketahui, China merupakan salah satu negara tujuan ekspor terbesar Indonesia

## Melambatnya *External Demand* China

Memasuki 2023, permintaan eksternal China yang melambat terhadap barang dan jasa global akan menjadi kendala utama bagi perekonomian Tiongkok, terutama jika masalah domestik masih belum terselesaikan (COVID-19, properti, harga pangan & energi yang lebih tinggi).

Kondisi ini jelas berpengaruh terhadap ekspor Indonesia ke Tiongkok, terutama untuk produk-produk komoditas. Potensi penurunan ekspor Indonesia ke Tiongkok menimbulkan potensi penurunan surplus perdagangan Indonesia, dan tentunya berimbas terhadap besaran pertumbuhan ekonomi nasional di Q4 2022 maupun di tahun 2023.

# BAGAIMANA PROYEKSI APINDO TERHADAP PERTUMBUHAN KESELURUHAN DI 2022 ?



Untuk tahun 2022 APINDO memperkirakan pertumbuhan ekonomi **2022 secara keseluruhan akan berada di kisaran 5,30% s/d 5,45% (yoy)**

Realisasi terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi 2022 oleh APINDO tersebut akan sangat bergantung pada **keberlanjutan ekspansi surplus perdagangan dan realisasi investasi di Kuartal IV 2022** untuk meredam resiko perlambatan pertumbuhan Konsumsi di kuartal yang sama

# DAN PROYEKSI APINDO TERHADAP PERTUMBUHAN 2023 ?

- Proyeksi pertumbuhan APINDO terhadap ekonomi 2023 (yoy) didasarkan pada beberapa **faktor determinan yang cukup kompleks** dan berpengaruh terhadap perekonomian 2023



- Lebarnya rentang proyeksi APINDO terhadap perekonomian 2023 didasarkan pada faktor *wait & see* terhadap keberhasilan kebijakan mitigasi Pemerintah di Q1 2023 untuk meredam berbagai potensi inflasi dan indikator restriktif lainnya yang dapat menghambat pencapaian target **pertumbuhan ekonomi 2023**
- APINDO terus mencermati perkembangan indikator-indikator utama makroekonomi hingga akhir 2022 sekaligus memperkirakan kelanjutan pemulihan dunia usaha di 2023
- Kesuksesan Pemerintah dalam kebijakan mitigasi untuk meredam dampak kelesuan perekonomian global terhadap ekonomi domestik** akan ditunjukkan melalui keberhasilan pencapaian indikator-indikator geliat dunia usaha di Semester I 2023 bagi optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi 2023 secara keseluruhan



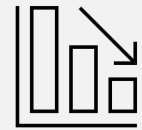


**PROSPEK  
PEREKONOMIAN  
2023 & DAMPAKNYA  
TERHADAP  
KEBERLANGSUNGAN  
DUNIA USAHA**



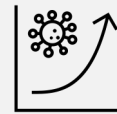
**REVIEW HASIL  
SURVEI “PROYEKSI  
*BISNIS 2023*”  
INTERNAL DPN  
APINDO**

		REALISASI	PROYEKSI	
		2021	2022	2023
Dunia		6,1%	3,2%	2,9%
Amerika Serikat		5,7%	2,3%	1%
Tiongkok		8,1%	3,3%	4,6%
Jepang		1,7%	1,7%	1,7%
Rusia		4,7%	-6%	-3,5%
Jerman		2,9%	1,2%	0,8%
Inggris		7,4%	3,2%	0,5%
Indonesia		3,7%	5,3%	5,2%
Malaysia		3,1%	5,1%	4,7%
Filipina		5,7%	6,7%	5%
Thailand		1,5%	2,8%	4%
India		8,7%	7,4%	6,1%



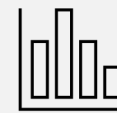
Pertumbuhan ekonomi

IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2022. Ekonomi global diprediksi hanya tumbuh 3,2% atau lebih rendah 0,4% dari perkiraan April 2022 lalu.



Inflasi

Prospek yang rendah tersebut disebabkan situasi perekonomian sedang tidak pasti. Hal ini termasuk akibat laju inflasi global yang melonjak.



Ekonomi Melambat

Ekonomi Indonesia 2022 diproyeksikan tumbuh 5,3% (yoy). Kemudian melambat menjadi 5,2% (yoy) pada 2023 meskipun lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang sebesar 3,7% (yoy).



Proyeksi menurun

Proyeksi ekonomi Indonesia pada 2022 turun 0,1 poin persentase dari ramalan IMF sebelumnya. IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,8 poin persentase di tahun 2023.

Sumber : Katadata, 2022.

## Kapasitas produksi industri

- APINDO mencermati bahwa sejauh ini inflasi sudah meningkat dalam tahap yang cukup cepat. Dan bila tidak terkontrol akan mempengaruhi daya beli masyarakat, mempengaruhi kapasitas produksi sektor riil, sehingga inflasi ini perlu dikendalikan

## Dampak proyeksi resesi 2023 terhadap keberlangsungan bisnis pelaku usaha : beberapa sinyalemen penurunan omzet & tendensi PHK?

- Bisnis 2023 lebih suram karena ancaman resesi global. Sudah ada penurunan permintaan seperti TPT dan sektor *Footware* (alas kaki), perusahaan di sektor tersebut *order* nya sudah mengalami penurunan 30% - 40%. Permenaker 18/2022 akan memperbesar PHK dan penyusutan lapangan kerja

## Dampak terhadap biaya logistik dan transportasi

- Kenaikan harga energi (minyak) secara langsung berdampak terhadap kenaikan biaya logistik dan transportasi, yang tentunya berimbas langsung terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen. APINDO meminta Pemerintah bergerak cepat menganalisis pengaruhnya terhadap sektor logistik sehingga potensi inflasi barang & jasa di tingkat akhir dapat diredam.

## Dampaknya Terhadap Pelaku Usaha



### Kapasitas produksi industri Anjlok

Perlambatan ekonomi dan lonjakan inflasi di negara-negara tujuan ekspor telah mengakibatkan penundaan dan pembatalan ekspor hingga 50%. Kondisi ini dikhawatirkan berlangsung sampai Semester I 2023.



### Sinyalemen penurunan omzet & tendensi PHK

Bisnis 2023 lebih suram karena ancaman resesi global. Beberapa sektor sudah ada penurunan permintaan seperti TPT dan sektor *Footwear* (alas kaki). Terdapat beberapa perusahaan sektor tersebut yang *order* nya sudah mengalami penurunan 30% - 40%



### Biaya logistik meningkat

Kenaikan harga energi (minyak) secara langsung berdampak terhadap kenaikan biaya logistik dan transportasi, yang tentunya berimbas langsung terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen. Pemerintah diharapkan cepat menganalisis pengaruhnya terhadap sektor logistik sehingga potensi inflasi barang & jasa di tingkat akhir dapat diredam.



## Tantangan Ketenagakerjaan

REKAP DATA PENGURANGAN PEKERJA / KARYAWAN  
(PHK / BERAKHIR "PKWT" TIDAK DIPARPANJANG)  
DI KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA BARAT  
PER: OKTOBER 2022

Date: 28-10-2022 (14.40 Wib)

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Perusahaan	Jumlah Pengurangan Karyawan	KETERANGAN
<b>A. PENGURANGAN KARYAWAN</b>				
1	KABUPATEN SUKABUMI	28	19.066	
2	KABUPATEN BOGOR	31	23.887	
3	KABUPATEN PURWAKARTA	7	4.106	
4	KABUPATEN SUBANG	12	14.029	
5	KOTA BOGOR	2	44	
6	KABUPATEN BANDUNG	10	2.009	
7	KOTA DEPOK	1	46	
8	KABUPATEN SUMEDANG	1	3.000	
9	KOTA BANDUNG	2	132	
10	KOTA CIMAH	2	234	
11	KOTA BEKASI	2	68	
12	KABUPATEN KARAWANG	8	706	
13	KOTA SUKABUMI	1	279	
14	KABUPATEN MAJALENGKA	4	697	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>111</b>	<b>68.303</b>	
<b>B. PERUSAHAAN TUTUP OPERASIONAL PRODUKSI</b>				
1	KOTA DEPOK	3	295	Januari - Juli 2022
2	KABUPATEN PURWAKARTA	4	4.470	Januari - April 2022
3	KABUPATEN BOGOR	9	6.248	Januari - Okt' 2022
<b>SUB TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>11.013</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>127</b>	<b>79.316</b>	

BANDUNG, 28 OKTOBER 2022  
ANGGOTA DEPEROV. JABAR UNSUR APINDO



### Gelombang PHK Massal Tak Terhindarkan

Di Jawa Barat, sudah ada 79 ribu tenaga kerja yang di PHK



## PHK Industri Padat Karya Sudah Mulai Terasa

- APINDO mencermati potensi yang cukup tinggi untuk Pekerja dirumahkan atau pengurangan jam kerja, bahkan PHK di sektor-sektor industri padat karya.

## Efisiensi & Strategi : PHK satu-satunya solusi ?

- Efisiensi sudah banyak dilakukan saat pandemi lalu, dan kini sudah relatif terbatas ruang untuk efisiensi lagi.

## Bagaimana upaya Pemerintah Memitigasi Resiko PHK ?

- Kenaikan upah minimum secara umum berbasis inflasi seperti regulasi. APINDO memandangi dimungkinkan untuk pengurangan jam kerja untuk sektor-sektor tertentu (garmen, sepatu, dll), misalnya menjadi 30 jam per minggu. Hal lainnya adalah perlunya percepatan finalisasi IEU-CEPA agar mengejar ketertinggalan *level of playing field* dari Vietnam. Membatalkan Permenaker 18/2022 dan kembali sepenuhnya menggunakan formulasi Upah Minimum PP 36/2021.

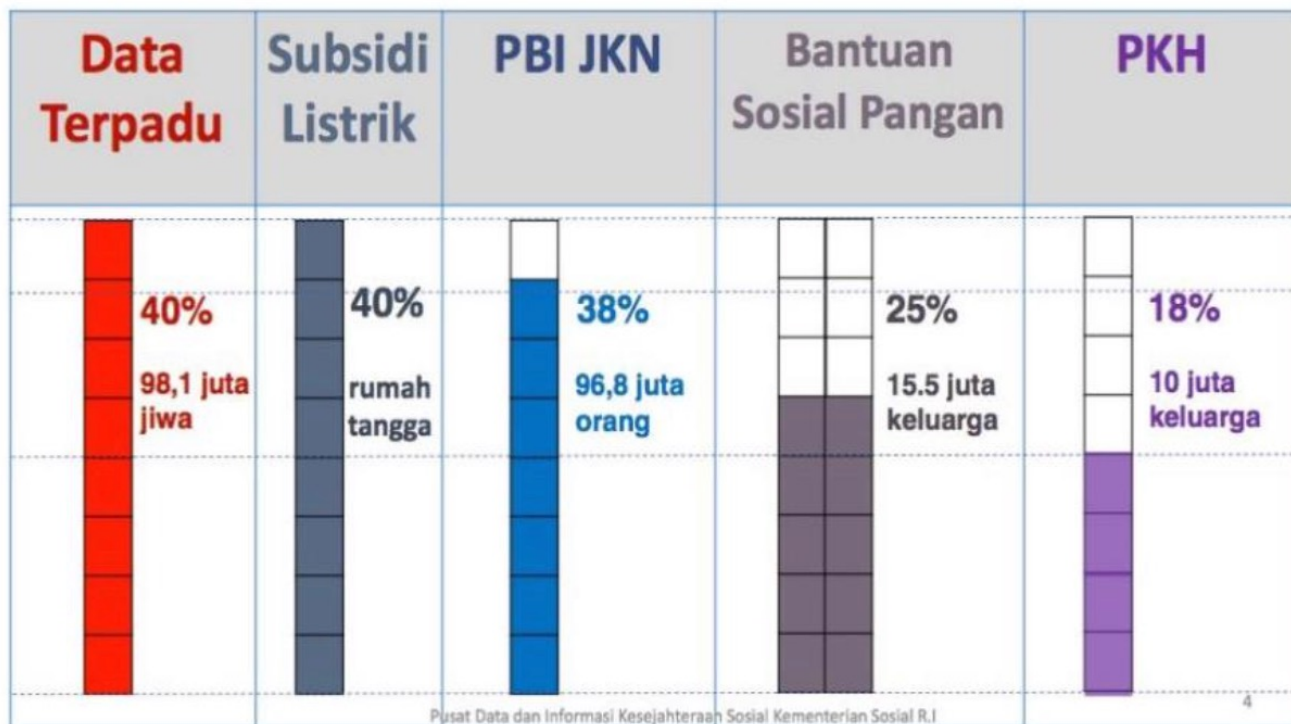


Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister. Adapun kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang teregister sesuai dengan Permensos Nomor 146 Tahun 2013 adalah Rumah Tangga yang:

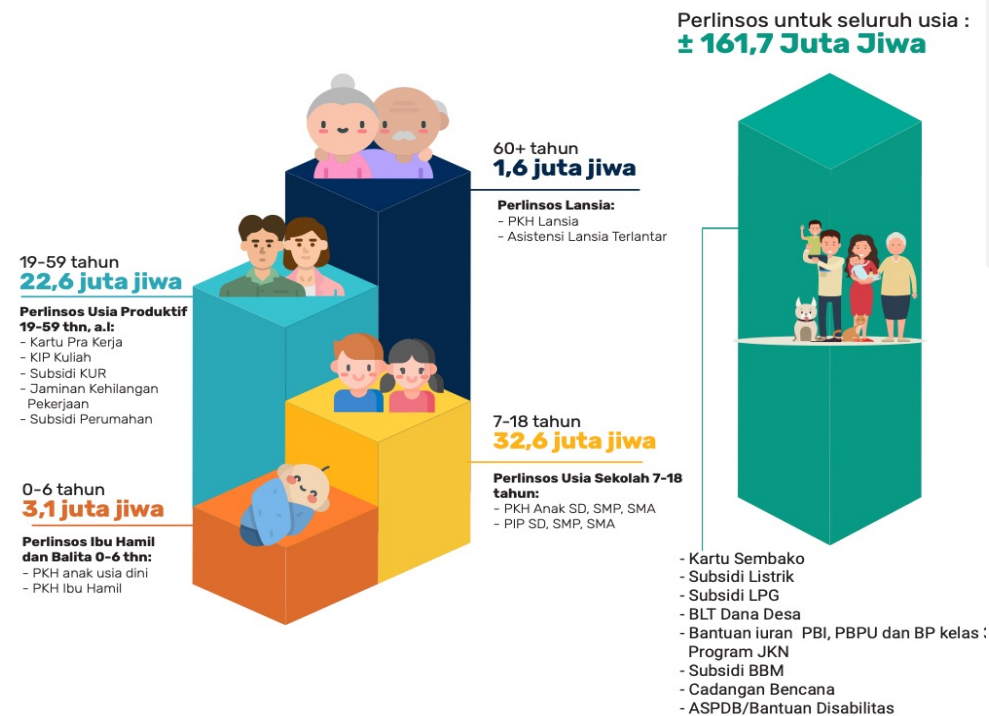
1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga; dan
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m<sup>2</sup>/orang; dan
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya

- Kepesertaan PBI diatur dalam Perpres No 101 Tahun 2011. Adapun kriteria Peserta PBI adalah sebagai berikut:
- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan.:
  - Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya
  - Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

## Jumlah Penduduk Penerima Subsidi



## Perlinsos Menjangkau Setiap Kelompok Usia



**Total Anggaran Rp431,5T**

## Investasi & Penyerapan Tenaga Kerja

Tahun	Investasi (Rp Triliyun)	Jumlah Tenaga Kerja ( orang )	Penyerapan TK/ Rp 1T Investasi ( orang )
2013	398.3	1.829.950	4.594
2014	463	1.430.846	3.090
2015	545.4	1.435.711	2.632
2016	613	1.392.398	2.271
2017	692.8	1.176.353	1.698
2018	721.3	960.052	1.331
2019	809.6	1.033.835	1.277
2020	817.2	1.156.361	1.415
2021	901.02	1.207.893	1.340

Sumber: Laporan Tahunan

Kriteria	Pembayaran Manfaat Program JHT			
	S.D Bulan Oktober 2022			
	Kasus	Manfaat (Rp)	Kasus (%)	Manfaat (%)
Mengundurkan Diri	1.648.953	17.096.880.784.707	58,7%	46,80%
PHK	834.037	8.574.268.084.496	29,7%	23,47%
Sebagian (10%)	115.143	463.482.508.292	4,1%	1,27%
Sebagian (30%)	435	8.951.717.748	0,0%	0,02%
Usia Pensiun	162.703	8.576.246.235.560	5,8%	23,48%
Meninggal Dunia	40.614	1.098.378.203.470	1,4%	3,01%
Cacat Total Tetap	9	203.381.502	0,0%	0,00%
Meninggalkan NKRI	5.907	710.591.638.828	0,2%	1,95%
<b>Total</b>	<b>2.807.801</b>	<b>36.529.002.554.603</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

\*sumber data: Laporan OJK, DJSN dan Kemnaker



# KELOMPOK UPAH MINIMUM & JUMLAH ANGGOTA SP

Rekapitulasi TK dengan Masa Kepesertaan Kurang dari 1 Tahun					
Tahun	TK Aktif (All Segmen)	TK Aktif Segmen PU	TK Kurang dari 1 Tahun Segmen PU	Persen All Segmen	Persen Segmen PU
2018	30.460.072	19.061.488	1.951.959	6,41%	10,24%
2019	34.367.581	19.629.972	3.462.525	10,07%	17,64%
2020	29.980.082	19.587.095	2.628.372	8,77%	13,42%
2021	30.660.901	20.596.598	2.545.778	8,30%	12,36%
2022	36.478.742	22.348.545	2.695.779	7,39%	12,06%

**Jumlah Penduduk Juni 2022:**  
**275.361.267 orang**  
**Jumlah Angkatan Kerja Feb 2022:**  
**144,01 juta orang**

NO	NAMA SP/SB, FEDERASI & KONFEDERASI SP/SB	JUMLAH ANGGOTA
1	KSPSI (Pimpinan Presiden)	649,747
2	KSPSI (Pimpinan Ketua Umum)	639,633
3	KSPI	397,226
4	DEN KSBSI	386,295
5	K SARBUMUSI	213,604
6	KSPN	104,574
7	FSP BUN	83,657
8	F KAHUTINDO	62,466
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,537,202</b>

## Pasal 24

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala Upah.

## RUMUS PENYESUAIAN UMK/UMP

- UM disesuaikan nilainya dari tahun ke tahun dengan menggunakan formula berikut [Pasal 26 ayat (5)]

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \left[ \text{Max}(PE_{(t)}, \text{Inflasi}_{(t)}) \times \left( \frac{\text{Batas atas}_{(t)} - UM_{(t)}}{\text{Batas atas}_{(t)} - \text{Batas bawah}_{(t)}} \right) \times UM_{(t)} \right]$$

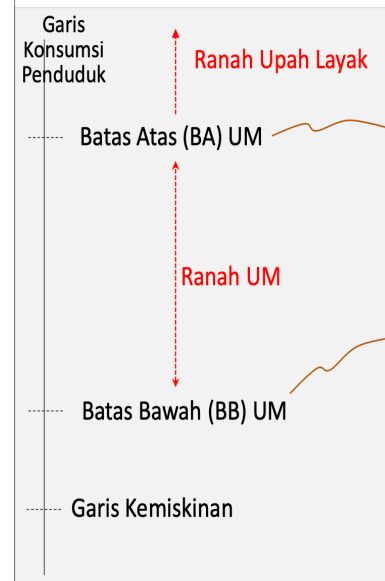
Menggunakan angka inflasi dan PE level provinsi

Faktor scaling untuk mengurangi kesenjangan UM antar wilayah

Rumus ini diterapkan pada:

- Level Provinsi untuk penyesuaian UMP
- Level Kab/Kota untuk penyesuaian UMK

## JANGKAUAN NILAI UMK/UMP



$$BA = \frac{\text{Rata}^2 \text{Konsumsi Penduduk per Kapita per bulan} \times \text{Rata}^2 \text{Banyaknya Anggota Rumah Tangga}}{\text{Rata}^2 \text{Banyaknya Anggota Rumah Tangga Yang Bekerja}}$$

$$BB = \frac{1}{2} \times BA$$

- Apabila setelah disesuaikan ternyata nilai UM melebihi nilai BA maka Gubernur wajib menetapkan UM sebesar nilai UM tahun berjalan [Pasal 27 ayat (4)]
- Pada saat PP 36/2021 ditetapkan, jika existing UM sudah berada di atas batas atas maka UM ditetapkan sama dengan upah minimum tahun berjalan



$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + (\text{Penyesuaian Nilai UM} \times UM_{(t)})$$

Keterangan:

$UM_{(t+1)}$  : Upah Minimum yang akan ditetapkan.

$UM_{(t)}$  : Upah Minimum tahun berjalan.

Penyesuaian Nilai UM : Penyesuaian nilai Upah Minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan  $\alpha$ .

$$\text{Penyesuaian Nilai UM} = \text{Inflasi} + (\text{PE} \times \alpha)$$

Keterangan:

Penyesuaian Nilai UM : Penyesuaian nilai Upah Minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan  $\alpha$ .

Inflasi : Inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen).

PE : Pertumbuhan ekonomi yang dihitung sebagai berikut:

a. bagi provinsi, dihitung dari perubahan pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal I, kuartal II, kuartal III tahun berjalan, dan kuartal IV pada tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal I, kuartal II, kuartal III tahun sebelumnya, dan kuartal IV pada 2 (dua) tahun sebelumnya;

b. bagi kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari perubahan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kuartal I, kuartal II, kuartal III, dan kuartal IV pada tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kuartal I, kuartal II, kuartal III, dan kuartal IV pada 2 (dua) tahun sebelumnya.

$\alpha$  : Wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 (nol koma satu nol) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga nol).

# UMP 2023 & UPAH RIIL 2022

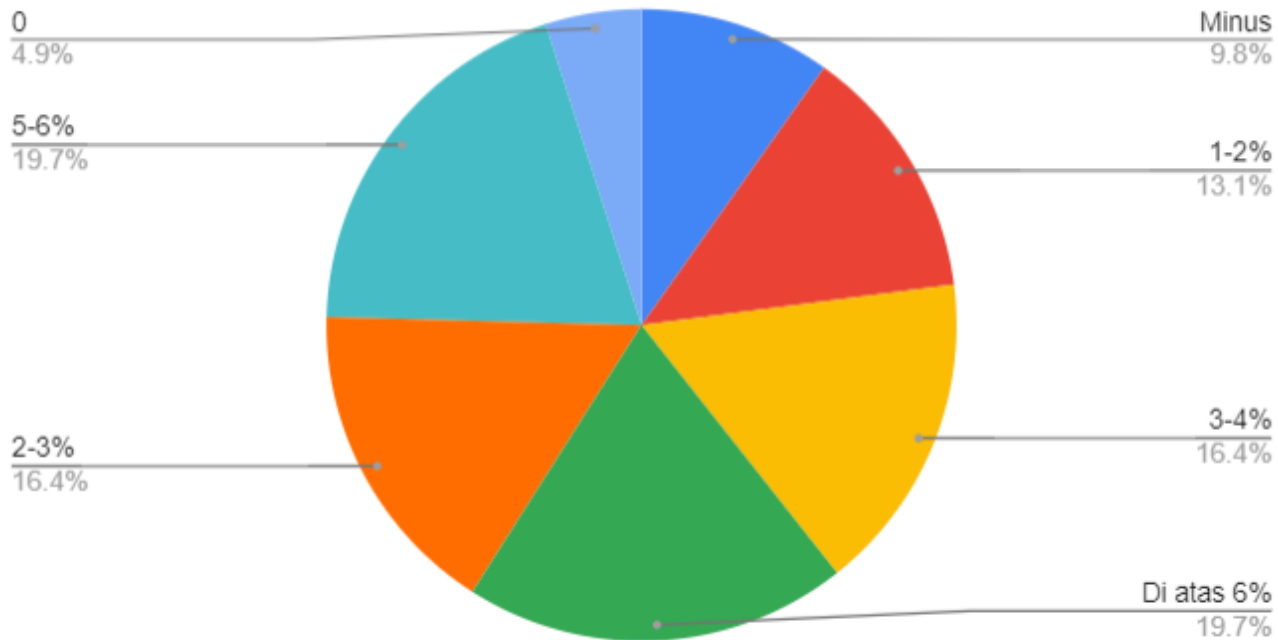
PROVINSI	UMP 2022	UMP 2023	KENAIKAN	GRAFIK
Aceh	Rp3.166.460	Rp3.413.666	7,8%	
Sumatera Utara	Rp2.522.609	Rp2.710.493	7,45%	
Sumatera Selatan	Rp3.144.446	Rp3.404.177	8,26%	
Sumatera Barat	Rp2.512.539	Rp2.742.476	9,15%	
Bengkulu	Rp2.238.094	Rp2.400.000	8,1%	
Riau	Rp2.938.564	Rp3.191.662	8,61%	
Kepulauan Riau	Rp3.050.172	Rp3.279.194	7,51%	
Jambi	Rp2.649.034	Rp2.943.000	9,04%	
Lampung	Rp2.440.486	Rp2.633.284	7,9%	
Bangka Belitung	Rp3.264.884	Rp3.498.479	7,15%	
Banten	Rp2.501.203	Rp2.661.280	6,4%	
DKI Jakarta	Rp4.573.845	Rp4.901.798	5,6%	
Jawa Barat	Rp1.841.487	Rp1.986.670,17	7,88%	
Jawa Tengah	Rp1.812.935	Rp1.958.169	8,01%	
Yogyakarta	Rp1.840.915	Rp1.981.782	7,65%	
Jawa Timur	Rp1.891.567	Rp2.040.244	7,8%	
Bali	Rp2.516.971	Rp2.713.672	7,81%	
Nusa Tenggara Timur	Rp1.975.000	Rp2.123.994	7,54%	
Nusa Tenggara Barat	Rp2.207.212	Rp2.371.407	7,44%	
Kalimantan Barat	Rp2.434.328	Rp2.608.601,75	7,16%	
Kalimantan Timur	Rp3.014.497	Rp3.201.396	6,2%	
Kalimantan Selatan	Rp2.906.473	Rp3.149.977	8,3%	
Kalimantan Tengah	Rp2.922.516	Rp3.181.013	8,845%	
Kalimantan Utara	Rp3.016.738	Rp3.251.702,67	7,79%	
Sulawesi Barat	Rp2.678.863	Rp2.871.794	7,2%	
Sulawesi Tengah	Rp2.390.739	Rp2.599.546	8,73%	
Sulawesi Utara	Rp3.310.723	Rp3.485.000	5,24%	
Sulawesi Tenggara	Rp2.576.016	Rp2.758.948	7,1%	
Sulawesi Selatan	Rp3.165.876	Rp3.385.145	6,9%	
Gorontalo	Rp2.800.850	Rp2.989.350	6,74%	
Maluku Utara	Rp2.862.231	Rp2.976.720	4%	
Maluku	Rp2.619.312	Rp2.812.827	7,39%	
Papua Barat	Rp3.200.000	Rp3.282.000	2,56%	
Papua	Rp3.561.932	Rp3.864.696	8,5%	

Lampiran 5 Rata-Rata, Persentase Perubahan Upah Buruh, dan Upah Minimum Menurut Provinsi (rupiah), Agustus 2020–Agustus 2022

Provinsi	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Agt 2020–Agt 2022	Perubahan Agt 2021–Agt 2022	Upah Minimum Provinsi 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2.394.965	2.341.701	2.327.990	-2,80	-0,62	3.166.460
Sumatera Utara	2.384.060	2.347.229	2.576.442	8,07	9,53	2.522.610
Sumatera Barat	2.660.533	2.644.615	2.655.767	-0,18	0,44	2.512.539
Riau	2.692.523	2.626.889	2.889.691	7,32	10,00	2.938.564
Jambi	2.205.868	2.268.338	2.520.767	14,28	11,13	2.698.941
Sumatera Selatan	2.231.143	2.225.264	2.630.695	17,91	18,22	3.144.446
Bengkulu	2.540.846	2.562.262	2.737.834	7,75	6,85	2.238.094
Lampung	2.185.101	2.197.346	2.322.728	6,30	5,71	2.440.486
Kepulauan Bangka Belitung	2.436.156	2.644.207	2.969.146	21,88	12,29	3.264.884
Kepulauan Riau	4.186.844	4.056.847	4.155.520	-0,75	2,43	3.050.172
DKI Jakarta	4.224.720	4.028.744	5.255.824	24,41	30,46	4.641.854
Jawa Barat	3.073.294	3.083.829	3.533.613	14,98	14,59	1.841.487
Jawa Tengah	2.088.172	2.074.451	2.200.716	5,39	6,09	1.812.935
D.I. Yogyakarta	2.308.710	2.272.425	2.462.583	6,66	8,37	1.840.916
Jawa Timur	2.389.494	2.368.719	2.638.752	10,43	11,40	1.891.567
Banten	3.693.411	3.782.482	4.370.278	18,33	15,54	2.501.203
Bali	2.446.534	2.388.382	3.002.534	22,73	25,71	2.516.971
Nusa Tenggara Barat	2.169.679	2.133.236	2.218.414	2,25	3,99	2.207.212
Nusa Tenggara Timur	2.167.121	2.104.730	2.100.927	-3,05	-0,18	1.975.000
Kalimantan Barat	2.400.905	2.424.267	2.645.920	10,21	9,14	2.434.328
Kalimantan Tengah	2.934.082	2.888.690	3.195.306	8,90	10,61	2.922.516
Kalimantan Selatan	2.651.958	2.634.325	2.898.486	9,30	10,03	2.906.473
Kalimantan Timur	3.640.294	3.695.990	3.963.732	8,88	7,24	3.014.497
Kalimantan Utara	3.340.249	3.289.079	3.427.759	2,62	4,22	3.016.738
Sulawesi Utara	3.106.020	3.124.581	3.240.217	4,32	3,70	3.310.723
Sulawesi Tengah	2.498.933	2.586.329	2.605.724	4,27	0,75	2.390.739
Sulawesi Selatan	2.792.616	2.760.728	2.876.952	3,02	4,21	3.165.876
Sulawesi Tenggara	2.574.589	2.573.453	2.831.991	10,00	10,05	2.710.596
Gorontalo	2.228.459	2.242.813	2.551.301	14,49	13,75	2.800.580
Sulawesi Barat	2.068.690	2.200.963	2.340.502	13,14	6,34	2.678.863
Maluku	2.766.573	2.676.833	2.719.294	-1,71	1,59	2.619.313
Maluku Utara	2.869.968	2.996.268	2.938.081	2,37	-1,94	2.862.231
Papua Barat	3.307.638	3.239.125	3.283.235	-0,74	1,36	3.200.000
Papua	3.977.594	3.949.649	3.954.382	-0,58	0,12	3.561.932
<b>Indonesia</b>	<b>2.756.345</b>	<b>2.736.463</b>	<b>3.070.756</b>	<b>11,41</b>	<b>12,22</b>	<b>2.729.463</b>

## Proyeksi Pertumbuhan Sektor Industri

Proyeksi pertumbuhan sektor industri/usaha Anda di Tahun 2023



Growth

Tahun 2023, terdapat 39.4% responden memproyeksikan pertumbuhan industri berada di atas 5% pada Tahun 2023

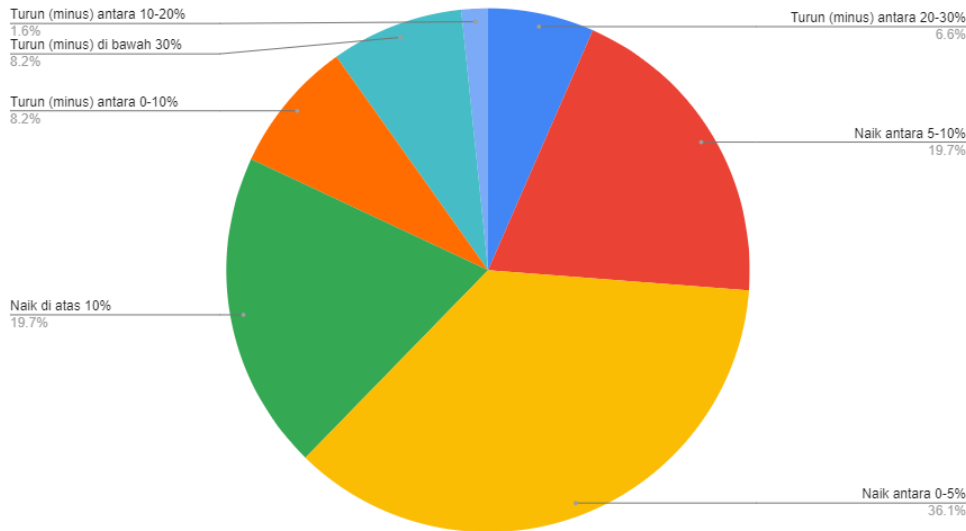
**Meskipun demikian 9,8% pelaku usaha memproyeksikan pertumbuhan minus**

Sumber : Survei Outlook Dunia Usaha 2023, Apindo Research Institute, November 2022.

## Proyeksi Sales Turnover

### All Respondent

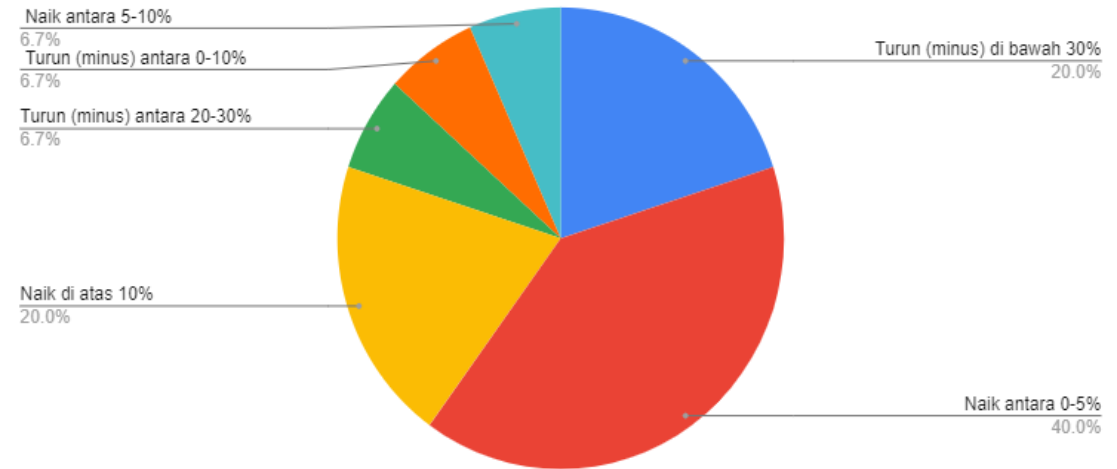
Proyeksi sales turn over (penjualan) perusahaan tahun 2023



**36.1%** responden memproyeksikan penjualannya meningkat hingga 5% pada Tahun 2023

### Export Oriented Respondent

Proyeksi sales turn over (penjualan) perusahaan tahun 2023



**20%** perusahaan export oriented memproyeksikan penjualannya turun di bawah 30% pada tahun 2023

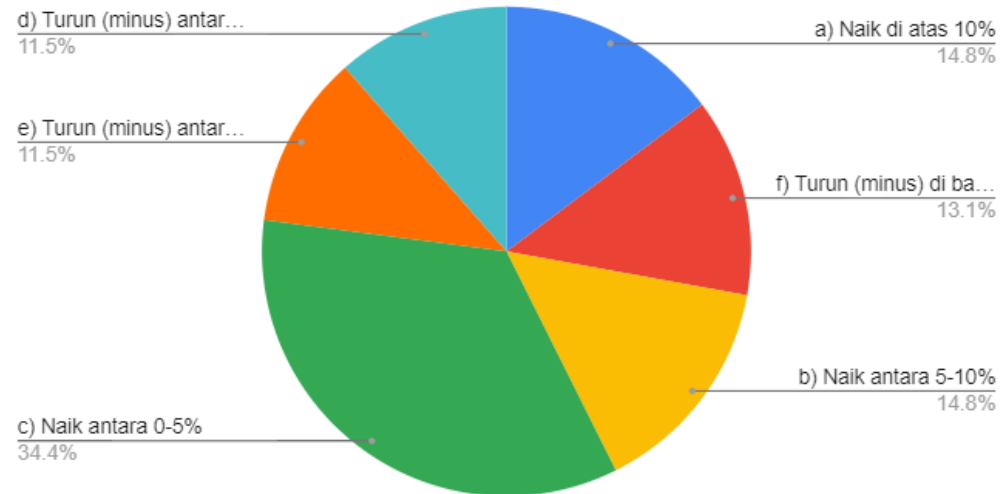
Sumber : Survei Outlook Dunia Usaha 2023, Apindo Research Institute, November 2022.



## Proyeksi Profit

### All Respondent

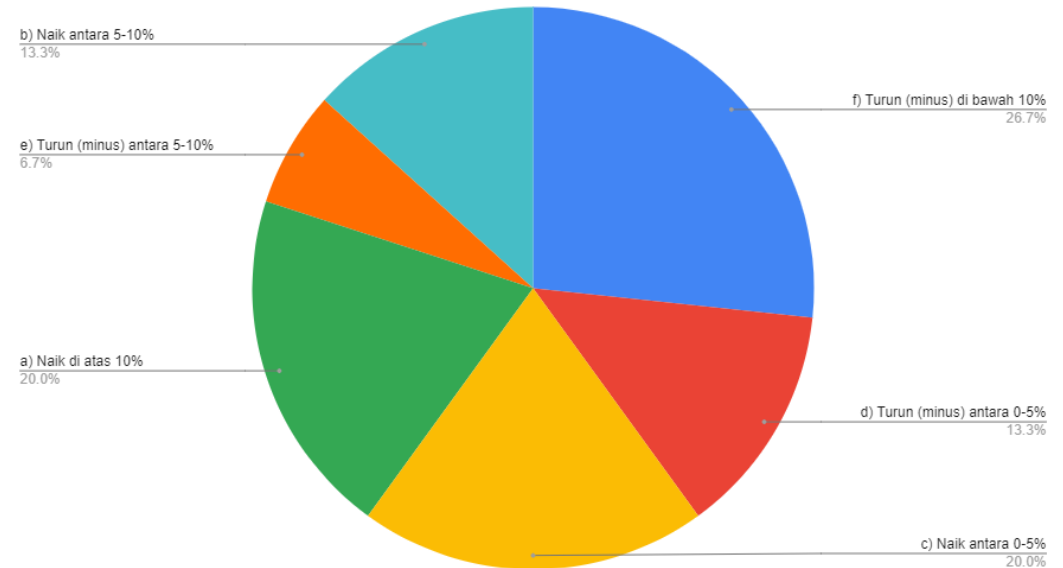
Bagaimana proyeksi Profit perusahaan tahun 2022 dibanding tahun 2021



33.4% responden menyatakan bahwa profit perusahaannya di Tahun 2022 meningkat sampai dengan 5% (yoy)

### Export Oriented Respondent

Bagaimana proyeksi Profit perusahaan tahun 2022 dibanding tahun 2021

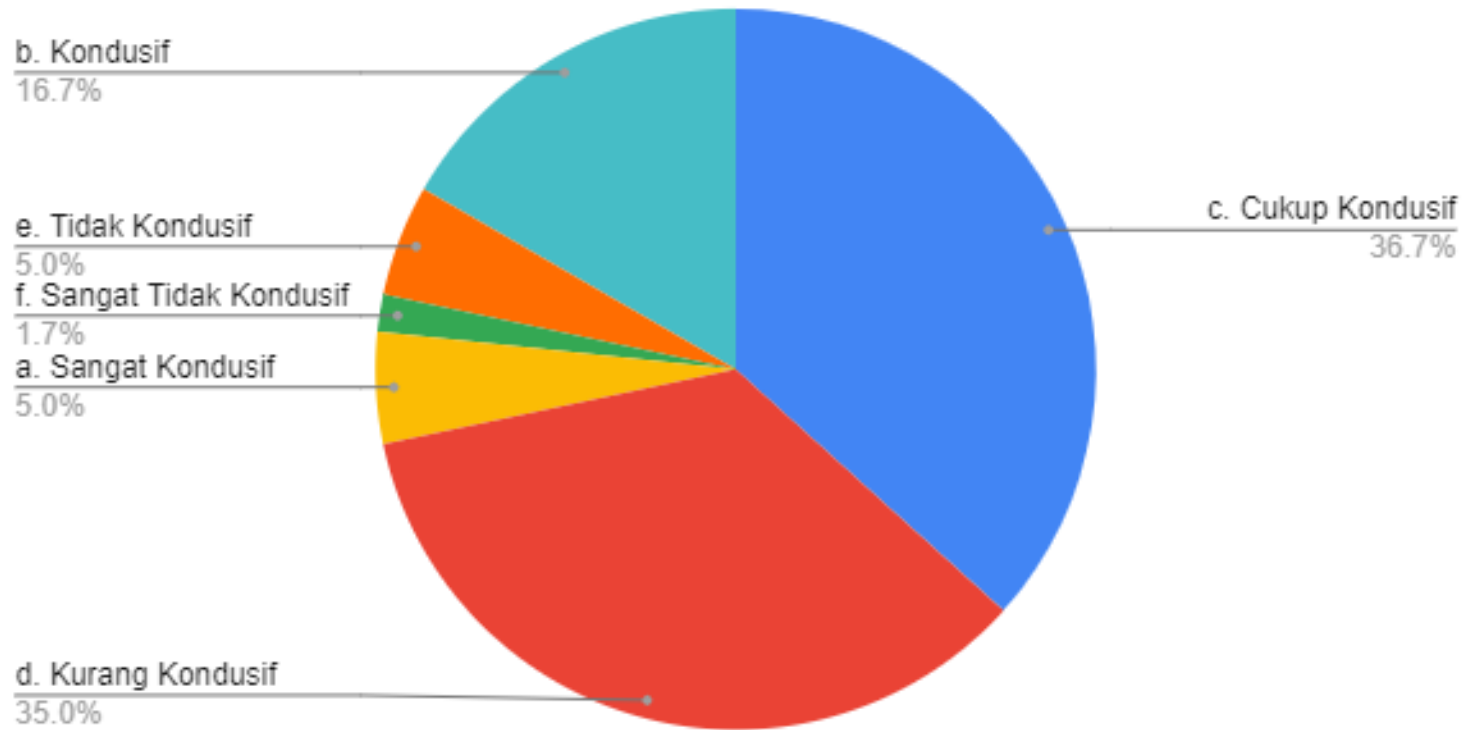


26.7% responden menyatakan bahwa profit perusahaannya di Tahun menurun hingga 10%



## Proyeksi Sosial Politik 2023

Menurut Anda bagaimana proyeksi kondisi sosial politik tahun 2023



### Iklm Sosial Politik

Kondisi Sosial Politik di Tahun 2023 dinilai sebagai salah satu tantangan Dunia Usaha di Tahun 2023 **dimana 35% responden menilainya kurang kondusif**

Sumber : Survei Outlook Dunia Usaha 2023, Apindo Research Institute, November 2022.

**Proyeksi Ketenagakerjaan Tahun 2023, ada 13.1 perusahaan akan mengurangi PKWT & 13.1% perusahaan akan mengurangi PKWTT**

Secara umum, manakah pernyataan di bawah ini yang akan paling sesuai kondisi daya serap tenaga kerja PKWT (Pekerja Waktu Tertentu) ataupun PKWTT (Pekerja Waktu Tidak Tertentu) di perusahaan Anda

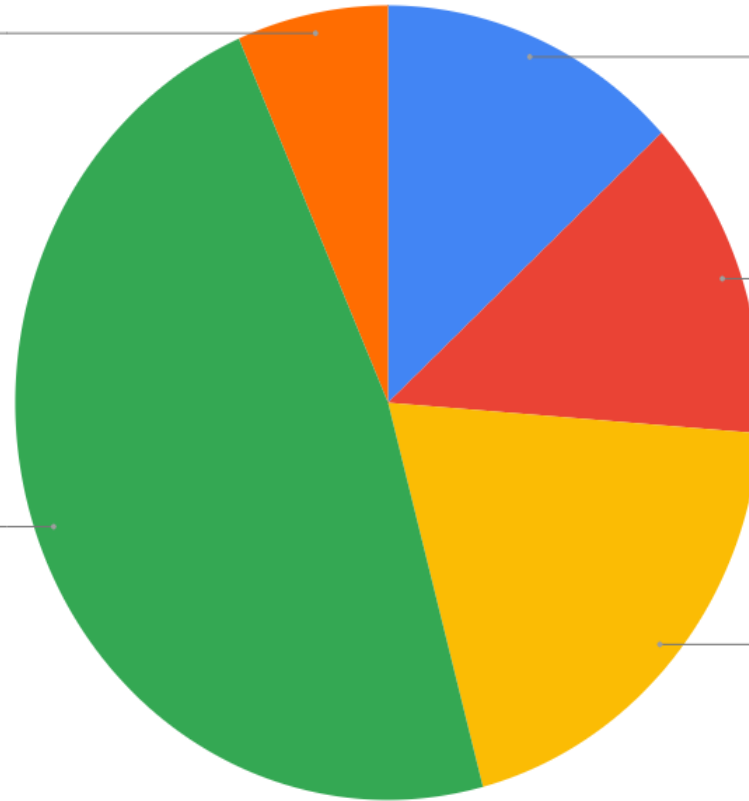
c. Perusahaan akan menambah jumlah pekerja PKWTT  
6.6%

d. Perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja PKWT  
13.1%

e. Perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja PKWTT  
13.1%

a. Perusahaan tidak akan menambah/mengurangi jumlah pekerja baik PKWT/PKWTT  
47.5%

b. Perusahaan akan menambah jumlah pekerja PKWT  
19.7%



Sumber : Survei Outlook Dunia Usaha 2023, Apindo Research Institute, November 2022.

Proyeksi Ketenagakerjaan 2023, ada 26,7% perusahaan **export oriented** yang akan mengurangi PKWT & 6,7% akan mengurangi PKWTT

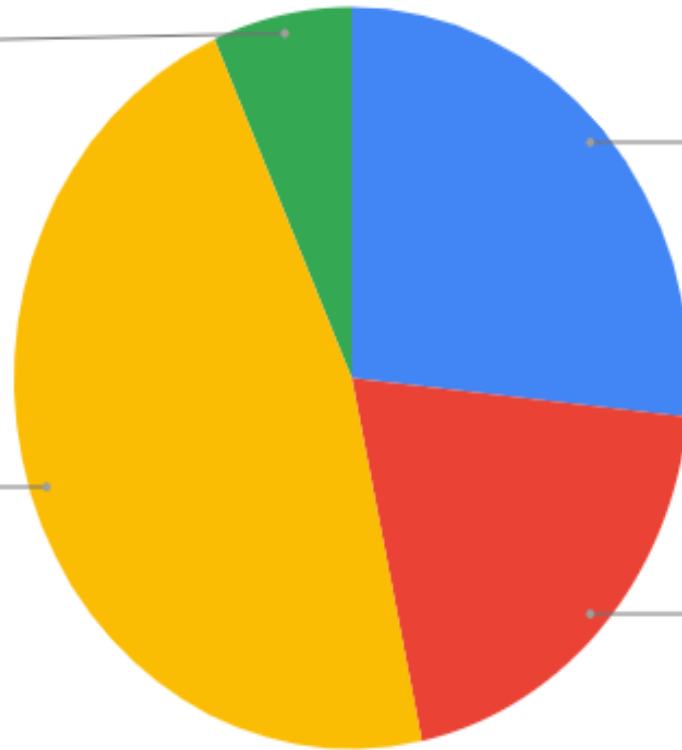
Secara umum, manakah pernyataan di bawah ini yang akan paling sesuai kondisi daya serap tenaga kerja PKWT (Pekerja Waktu Tertentu) ataupun PKWTT (Pekerja Waktu Tidak Tertentu) di perusahaan Anda

d. Perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja PKWT  
6.7%

e. Perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja PKWTT  
26.7%

a. Perusahaan tidak akan menambah/mengurangi jumlah pekerja...  
46.7%

b. Perusahaan akan menambah jumlah pekerja PKWT  
20.0%





# **PANDANGAN & REKOMENDASI DUNIA USAHA BAGI STRATEGI ANTI-RESESI DALAM MEMASUKI TAHUN 2023 YANG SARAT KETIDAKPASTIAN**



## Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia

- 6% – 8% Pertumbuhan ekonomi
- USD 9,1 trilyun Produk Domestik Bruto (PDB)

**Ekonomi terbesar ke 4**



**Ekonomi terbesar ke 17**

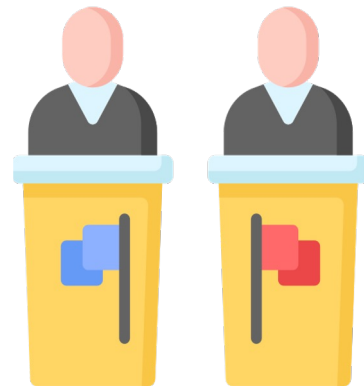


## *Pemulihan Ekonomi Membutuhkan...*



Kepastian Hukum dan  
Kemudahan Berusaha  
Bagi Investor

UU Cipta Kerja



Stabilitas Dalam Negeri Di  
2023 Menjelang Pesta  
Demokrasi 2024

“Bertanding untuk  
Bersanding”



Kolaborasi Sektor  
Swasta & Pemerintah

Indonesia  
Incorporated

## Peran Dunia Usaha



*Penguatan sektor industri, investasi dan perdagangan*



- Mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- Penguatan pasar dalam negeri & Substitusi Impor
- Meningkatkan lapangan kerja dalam skala besar dan mengurangi kesenjangan
- Menerapkan teknologi 4.0 dalam skala besar
- Mendorong percepatan transformasi energi

## Menjaga Momentum Pemulihan



### Dukungan Kepada Sektor Usaha

Dukungan terhadap sektor sektor usaha seperti pariwisata, retail, industri padat karya pada umumnya dan UMKM sangat penting untuk dilakukan mengingat daya serap tenaga kerja yang besar dan potensi pengembangannya ke depan.



### Menjaga Momentum Pemulihan

Dunia pariwisata dan industri lain telah menunjukkan realisasi pemulihan sejak awal 2022. Pemerintah diharapkan menyadari kondisi tersebut dengan berkebijakan antisipatif yang tepat agar sektor-sektor yang telah pulih tersebut tidak kembali terpuruk di 2023 akibat ancaman kelesuan ekonomi global dan domestik di 2023.



### Stimulus Dunia Usaha

Lanjutkan program kebijakan anggaran stimulus di 2023 serta meneruskan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) di 2023. Pemerintah diharapkan membuat kebijakan lebih fleksibel dan antisipatif apabila ternyata kelesuan ekonomi dan aktivitas usaha di 2023 benar-benar terjadi.



### Perhatian Khusus Industri Padat Karya

Perhatian khusus industri padat karya yang di tahun 2022 semakin pulih, agar diperhatikan dan diawasi Pemerintah untuk menghindari keterpurukan kembali di 2023. Produksi dan penjualan sektor padat karya jelas berkontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja.

## Menjaga Laju Inflasi



### Keterjangkauan Harga

Pemerintah memberikan stimulus bantuan sosial dengan operasi pasar, kebijakan HET, dan harga acuan untuk bahan pangan.



### Ketersediaan Pasokan

Ketersediaan pasokan melalui pemenuhan logistik di daerah konsentrasi konsumsi tinggi. Cadangan beras Bulog dinilai tetap memadai. Di tingkat ritel, dilakukan pembatasan pembelian. Selain itu, pemerintah akan memberikan relaksasi impor khusus komoditas tertentu.



### Memastikan Kelancaran Distribusi

Memastikan kelancaran distribusi. Pengawasan juga dilakukan bersama Polri, kerja sama antar Pemda, dan rekayasa sistem logistik melibatkan BUMN dan BUMD.



### Melakukan Komunikasi Efektif

Pemerintah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Pusat (TPID dan TPIP) berkoordinasi dan melakukan monitoring stok. APINDO meminta bila terjadi *panic buying*, Pemerintah agar memunculkan komunikasi bijak untuk meredam fenomena kontraproduktif tersebut.

# REKOMENDASI LAINNYA UNTUK MENGANTISIPASI ANCAMAN INFLASI & KELESUAN EKONOMI 2023

✓ *Koordinasi, Sinkronisasi Antar K/L*

✓ *Langkah Strategis Dalam Investasi Publik Jangka Panjang & Perubahan KPI APBN*

✓ *Kemudahan Akses & Disbursement Dana Pemulihan Ekonomi & Dana Stimulus*

✓ *Bottom-Up Approach*

✓ *Penguatan Sistem Jaminan Sosial Bagi Masyarakat*

✓ *Fleksibilitas Penggunaan Dana Desa*

✓ *Langkah Strategis Soft Landing & Exit Strategy*

✓ *Penguatan Ekosistem Digital*



# REKOMENDASI LAINNYA UNTUK MENGANTISIPASI ANCAMAN INFLASI & KELESUAN EKONOMI 2023



## Koordinasi, Sinkronisasi Antar K/L

- Koordinasi, sinkronisasi antar K/L di sektor moneter, keuangan dan fiskal perlu ditingkatkan untuk menjaga harmonisasi orkestra kebijakan, sehingga sentimen pasar tetap positif dan stabil.
- Menjaga stabilitas indikator makroekonomi bertujuan mempertahankan kredibilitas, stabilitas dan sentimen pasar yang positif di 2023.



## Langkah Strategis Dalam Investasi Publik Jangka Panjang & Perubahan KPI APBN

- Pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis dalam investasi publik jangka panjang sekaligus memperhatikan kesinambungan fiskal jangka panjang.
- Kondisi pandemi menyebabkan terjadinya *accidental transformation* dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang menimbulkan potensi terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian.
- KPI penggunaan APBN harus segera diubah dari berbasis target 100% pembelanjaan menjadi berbasis target kinerja dan efisiensi.



## Kemudahan Akses & Disbursement Dana Pemulihan Ekonomi & Dana Stimulus

- Pemerintah memberi kemudahan dalam hal akses dan disbursement dana pemulihan ekonomi serta dana stimulus, tetapi tetap memperhatikan aspek good governance.
- Membangun suatu sistem yang terintegrasi, transparan, dan juga akuntabel sesuai tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan sehingga mengurangi kekakuan prosedur yang terjadi, sehingga dana pemulihan ekonomi maupun stimulus dapat optimal digunakan untuk mengantisipasi ancaman kelesuan ekonomi 2023 mendatang.



## Bottom-Up Approach

Apabila kelesuan ekonomi 2023 mendatang terealisasi, maka Pemerintah harus mendesain program pemulihan ekonomi dan pemberian stimulus berdasarkan kebutuhan (*bottom up approach*)

Salah satunya adalah restrukturisasi kredit serta kemudahan pembiayaan serta fleksibilitas program pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM



## Penguatan Sistem Jaminan Sosial Bagi Masyarakat

- Penguatan sistem jaminan sosial bagi masyarakat melalui perluasan cakupan penerima bantuan sosial untuk memperluas cakupan penerima manfaat yang layak mendapatkannya di saat perekonomian yang sulit.
- Program jaminan / bantuan sosial harus bersifat adaptif dalam merespon perubahan yang terjadi di masyarakat dengan jalan *on demand application system* yaitu masyarakat secara mandiri dapat melapor jika memerlukan bantuan sosial.



## Fleksibilitas Penggunaan Dana Desa

- Fleksibilitas penggunaan dana desa perlu diperpanjang hingga setidaknya tahun 2023.
- Dalam masa pandemi, dana desa berfungsi untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat desa.
- Demikian juga fungsi dana desa tersebut dalam mengantisipasi ancaman inflasi dan kelesuan ekonomi 2023 mendatang.
- Untuk menjaga akuntabilitas, monitoring berkala dan pengawasan penggunaan dana desa harus menjadi prioritas yang harus dilakukan

# REKOMENDASI LAINNYA UNTUK MENGANTISIPASI ANCAMAN INFLASI & KELESUAN EKONOMI 2023



## Langkah Strategis Soft Landing & Exit Strategy

- Otoritas fiskal dan moneter harus mengambil langkah-langkah strategis untuk *soft landing and exit strategy* dalam pembiayaan pemulihan ekonomi mendatang.
- Pada dasarnya stimulus hanya bersifat sementara dan tidak dapat dilakukan secara terus–menerus dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal dan pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap kemungkinan inflasi dan potensi keterpurukan ekonomi 2023 mendatang.



## Penguatan Ekosistem Digital

- Di sektor keuangan, diversifikasi produk jasa keuangan berbasis teknologi digital sangat perlu dilakukan.
- Dengan terbatasnya mobilitas akibat pandemi, para pelaku usaha khususnya UMKM juga harus melakukan adaptasi teknologi dan digitalisasi baik dalam hal pelayanan maupun penjualan produk.
- Pembinaan dan pendampingan menyeluruh bagi UMKM perlu dilakukan, selain untuk mengurangi kesenjangan antar UMKM juga mendukung literasi teknologi bagi UMKM, sehingga pada akhirnya UMKM dapat mengembangkan produk lokal unggulan.

- ❖ Terkait situasi geopolitik & konflik, beberapa komoditas perdagangan utama seperti minyak mentah dan gandum masih merupakan komoditi penting yang dibutuhkan industri dan perekonomian Indonesia.
- ❖ Pemerintah harus cepat mengkalkulasi berbagai potensi dampak berantai yang ditimbulkannya terhadap inflasi demi mempersiapkan kebijakan antisipatif yang tepat sasaran agar target pertumbuhan ekonomi 2022 Indonesia tetap terjaga dan resiko keterpurukan 2023 dapat dihindarkan.

- ❖ Menghadapi krisis konflik seperti Rusia-Ukraina serta potensi konflik global lainnya (Korea Utara, Taiwan, LCS, dll), maka di 2023 Pemerintah harus memiliki *roadmap contingency plan* yang memadai terhadap sumber-sumber komoditi penting yang dibutuhkan Indonesia yang berdampak besar terhadap inflasi.
- ❖ Diantaranya Pemerintah dapat bekerjasama dengan pemasok minyak mentah internasional dari beberapa negara, serta komoditi lainnya seperti gandum dan lain-lain yang dibutuhkan ekonomi dan industri domestik.
- ❖ Adanya gangguan konflik seperti terjadi di 2022 ini membuktikan bahwa potensi inflasi yang dapat ditimbulkannya dapat merugikan apabila *contingency plan* Pemerintah tidak dipersiapkan dengan baik dari jauh-jauh hari.

- ❖ Suku bunga acuan Bank Indonesia hingga awal Desember 2022 ini telah bertengger di level 5,25%.
- ❖ Berdasarkan berbagai perkembangan indikator makro ekonomi yang ada, maka APINDO menghimbau agar di kesempatan berikutnya, BI jangan sampai menaikkan suku bunga lagi terlalu cepat.
- ❖ APINDO menganggap *timing* adalah suatu isu kebijakan yang harus diperhatikan.

- ❖ APINDO menilai bila BI kembali menaikkan suku bunga acuan terlalu cepat di atas level 5,25%, proses pemulihan ekonomi yang saat ini sedang berlangsung akan terganggu.
- ❖ Sebaliknya, APINDO juga memahami bila keputusan menaikkan suku bunga dilakukan terlalu lambat, maka akan memiliki risiko kenaikan inflasi yang cukup cepat.

- ❖ Kapan saatnya BI harus kembali menaikkan suku bunga? APINDO berpendapat hal itu akan bergantung pada bagaimana Pemerintah menjaga inflasi agar tidak terlalu tinggi, sehingga tidak menekan daya beli masyarakat serta tidak berdampak terhadap tertahannya laju pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

- ❖ APINDO mencermati bahwa sejauh ini inflasi hingga kuartal IV 2022 sudah meningkat dalam tahap yang cukup cepat.
- ❖ Dan bila tidak terkontrol akan mempengaruhi daya beli masyarakat, mempengaruhi kapasitas produksi sektor riil, sehingga kemudian inflasi ini perlu dikendalikan.
- ❖ Oleh karena itu Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kesanggupan APBN dalam meredam dampak inflasi tersebut kepada daya beli masyarakat.



❖ APINDO juga mengamati bahwa harga-harga yang sudah mengalami kenaikan cukup tinggi tersebut hingga November 2022 lalu, membutuhkan bantuan fiskal melalui penerapan subsidi yang lebih *well targeted*.

❖ Bagaimanapun juga, APINDO optimis bahwa perkembangan inflasi di Indonesia saat ini tidak akan menghambat secara ekstrem laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan.

❖ APINDO menganggap kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal Pemerintah sepanjang ini diputuskan secara matang dengan berbagai pertimbangan yang mengakomodir masukan berbagai pihak, khususnya sektor riil.

❖ Dengan demikian APINDO memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga acuan pada Semester I tahun 2023.

❖ Walaupun BI akhirnya kembali menaikkan suku bunga acuan pada awal 2023, APINDO meminta BI dan Pemerintah memiliki kebijakan antisipatif terhadap berbagai resiko yang ditimbulkan dari keputusan itu, sehingga potensi laju pertumbuhan ekonomi di 2023 tidak terhambat.

❖ Jangan sampai keterpurukan sebelumnya akibat pandemi terulang kembali di 2023 akibat kebijakan Pemerintah gagal mengantisipasi. Sektor usaha yang terlanjur terpuruk akan membutuhkan waktu pemulihan bertahun-tahun.

# PANDANGAN LAINNYA DARI DUNIA USAHA : FTA & CEPA

SURPLUS PERDAGANGAN DI 2023 AKAN MEMBANTU MENOPANG PEREKONOMIAN TERHADAP ANCAMAN PERLAMBATAN EKONOMI : **MAKSIMALISASI KONTRIBUSI FTA & CEPA**

- > Keterbukaan perdagangan mengkomitmenkan **reformasi struktural nasional** untuk **trade off** yang maksimal
- > Perhatian pada peningkatan **efisiensi biaya produksi manufaktur di Indonesia & efisiensi biaya supply chain perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra dagang**
- > Keterbukaan untuk **meliberalisasi sektor jasa penting penunjang servisifikasi industri manufaktur nasional**
- > Penambahan **frekuensi sosialisasi CEPA** yang dimaksudkan agar **manfaat CEPA dengan negara mitra dipahami pelaku usaha secara komprehensif** dan dioptimalkan pemanfaatannya
- > Peningkatan **presence industri kreatif & pengembangan produk ekspor khas “negara tropis” atau “negara muslim”**
- > **Keberhasilan capaian dalam negosiasi CEPA** antara Indonesia dengan negara mitra, **perlu ditingkatkan di level implementasi**
- > Perlu adanya database dan transparansi data yang lebih baik terkait penggunaan manfaat dari beberapa CEPA dan *outbound* investasi
- > **Regulatory coherence kebijakan nasional dengan komitmen internasional** perlu ditingkatkan melalui simplifikasi kebijakan, RIA, konsultasi dengan pelaku usaha, dan transparansi proses pembuatan kebijakan
- > Di level teknis perlu ada **pembenahan kebijakan dan instrumen teknis pendukung pelaksanaan** agar manfaat CEPA bisa diklaim dengan mudah oleh pelaku usaha
- > Perlu **peningkatan sosialisasi dan edukasi komitmen internasional**, dalam hal ini negara-negara mitra, kepada pelaku usaha nasional



# Terima Kasih

**Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)**

**Permata Kuningan Building, Lt. 10**

**Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C**

**Guntur – Setiabudi**

**Jakarta Selatan 12980**

**Tel. (62) 21 8378 0824,**

**Fax. (62)21 8378 0823/8378 0746**

**Website : [www.apindo.or.id](http://www.apindo.or.id)**



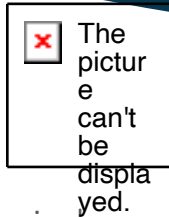


# LAMPIRAN

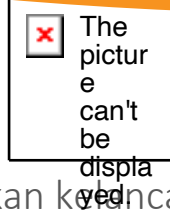
- **Kecepatan penyaluran insentif berusaha** di 2021 lebih baik dari tahun 2020. Hambatan realisasi insentif berusaha di 2020 dan 2021 disebabkan oleh kurangnya sosialisasi insentif pajak dan sistem aturan dan persyaratan yang berubah-ubah. Selanjutnya, APINDO berharap agar pemberian insentif berusaha hingga akhir 2022 dilaksanakan dengan tingkat penyerapan yang maksimum.
- **Realisasi program PEN di sisa tahun 2022 untuk program dukungan UMKM dan korporasi** agar dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan. Untuk mendorong penyerapan yang lebih optimal, Pemerintah dapat menambah jumlah penerima dukungan UMKM dari anggaran PEN, sehingga anggaran dapat disalurkan kepada usaha-usaha yang belum mendapatkan bantuan. Kedua, penyerapan dukungan UMKM dan korporasi yang belum maksimal dikarenakan terkait dengan masalah teknis pendataan dan administrasi. Ketiga, Pemerintah dapat menambahkan pos subsidi pada klaster anggaran dukungan UMKM dan korporasi berbentuk subsidi kuota internet untuk UMKM yang menggunakan platform digital.
- **Realisasi program PEN untuk perlindungan sosial khususnya Bantuan Subsidi Upah** masih tetap terkendala pada permasalahan terkait **data**. Hal ini dikarenakan banyak sektor informal yang tidak mendapatkan insentif karena berada di luar data penerima bantuan subsidi upah.
- Keseluruhan upaya tersebut diatas untuk tahun 2022 ini bertujuan agar sektor usaha, terutama kecil dan menengah, dapat mengantisipasi dan menghadapi kemungkinan kelesuan ekonomi dan operasional berusaha di 2023.



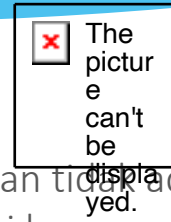
*APINDO menyarankan beberapa hal agar Pemerintah bisa menjaga kestabilan inflasi, khususnya di sektor pangan*



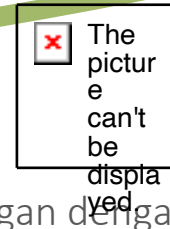
Adanya keseimbangan terhadap volume penawaran dan permintaan pangan nasional. Impor bahan pangan dilakukan bila benar-benar dibutuhkan atau ketersediaan di dalam negeri tidak mencukupi. Hal ini tentu berimplikasi pada pembenahan atau perbaikan tata kelola dan pencatatan *supply* pangan nasional



Memastikan kelancaran dan distribusi *supply* pangan, khususnya di daerah yang krisis dari sisi jumlah penduduk. Kelancaran dan keterjangkauan biaya logistik pangan dapat menjadi penentu wajar atau tidaknya kenaikan harga pangan nasional di daerah



Memastikan tidak adanya manipulasi harga pasar dari oknum-oknum di sepanjang jalur distribusi pangan. Jika hal ini bisa dilakukan secara berkala dengan disiplin oleh Pemerintah, APINDO yakin inflasi pangan nasional bisa dicegah dan dikendalikan dengan baik, tanpa membebani masyarakat serta mencegah melonjaknya angka kemiskinan



Sehubungan dengan tarif PPN yang telah dinaikkan, APINDO mengharapkan pemerintah menyertainya dengan program yang dapat menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Instrumen bantuan sosial maupun subsidi, dan kebijakan lainnya diharapkan untuk mitigasi resiko penurunan tajam daya beli.

## Faktor Pertimbangan Investasi Masuk Ke Indonesia



Pasar Domestik  
Besar



Production Hub  
Competitive



Tenaga Kerja  
Besar



Rill Return  
Tinggi



# PELUANG PELAKU USAHA 2022 & 2023

Peningkatan Permintaan Domestik	Penguatan Ekspor	Pembangunan Infrastruktur	Reformasi Struktural	G20 pada 2022
<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan secara gradual permintaan domestik yang didorong oleh penurunan kasus C19 dan pariwisata yang perlahan mulai bangkit dan dibuka oleh Pemerintah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pemulihan ekonomi beberapa mitra dagang Indonesia, seperti AS dan Tiongkok, akan mendorong permintaan barang ekspor dari Indonesia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pemerintah akan mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional akan mendorong tercapainya pemerataan dan kelancaran konektivitas serta memfasilitasi lebih berkembangnya investasi swasta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Agenda-agenda reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja juga mulai memberikan dampak positif kepada daya saing destinasi investasi dan peningkatan nilai tambah produk-produk unggulan ekspor nasional</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Presidensi G20 di Indonesia menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk memfokuskan agenda pembangunan berkelanjutan dan memfasilitasi diskusi pemulihan ekonomi global yang lebih baik dan lebih kuat</li></ul>





# TOP OF MIND GROWTH INDUSTRY TAHUN 2022-2023

1. E-Commerce, pandemic telah mengakselerasi pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Sektor ini diperkirakan masih akan terus tumbuh hingga tahun 2025.
  2. Digital, tren digitalisasi pada layanan komersial dan pemerintahan akan terus berlanjut pada tahun 2022. Tren ini paling banyak diperkirakan pada sector pendidikan, kesehatan, dan fintec.
  3. Petrokimia
  4. F&B (dorongan utilisasi modal kerja)
  5. Tambang dan Processing Industries (industry baterai dan EV)
  6. Logistik (kapal container dan bulk carrier)
  7. Sawit dan Refineries (hilirisasi)
  8. Telekomunikasi (data center, fiber options, and infra telekomunikasi data)
  9. Healthcare (game changer medical tourism)
-